**Abstrak** Artikel ini mengusulkan konsep etika masyarakat untuk melengkapi dan memperluas

kerangka etika lain yang digunakan dalam pendidikan (mis. etika keadilan, kritik, dan perawatan). Melanjutkan

dari definisi tradisional etika sebagai studi tentang tugas dan kewajiban moral, etika

komunitas didefinisikan sebagai tanggung jawab moral untuk terlibat dalam proses komunal sebagai pendidik

mengejar tujuan moral pekerjaan mereka dan mengatasi tantangan kehidupan dan pekerjaan sehari-hari yang berkelanjutan

di sekolah. Etika komunitas dengan demikian memusatkan komunal di atas individu sebagai yang utama

lokus agensi moral di sekolah. Kegunaan etika masyarakat dalam hal pencapaian

tujuan moral sekolah diilustrasikan dengan contoh keadilan sosial. Penulis

menyimpulkan bahwa etika masyarakat adalah kendaraan yang dapat mensintesis banyak pekerjaan saat ini

praktik kepemimpinan yang terkait dengan keadilan sosial dan tujuan moral lainnya dari kepemimpinan pendidikan.

Dalam artikel ini, saya mengusulkan ide tentang etika komunitas untuk melengkapi dan

memperluas kerangka etika lain yang digunakan dalam pendidikan (mis. etika keadilan, kritik,

dan perawatan). Berasal dari definisi etika tradisional sebagai studi

tugas dan kewajiban moral, saya mendefinisikan etika komunitas sebagai moral

tanggung jawab untuk terlibat dalam proses komunal sebagai pendidik mengejar moral

tujuan pekerjaan mereka dan mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari dan

bekerja di sekolah. Dengan demikian, etika komunitas memusatkan komunal atas

individu sebagai lokus utama agensi moral di sekolah. Berikut ini, saya

pertama hadir beberapa latar belakang tentang kepemimpinan moral dan etika dalam pendidikan; saya

kemudian berpendapat bahwa etika komunitas adalah pelengkap yang dibutuhkan untuk yang lain

kerangka etika biasanya digunakan dalam pendidikan dan menunjukkan bagaimana kaitannya dengan

mencapai tujuan moral sekolah. Dengan kata lain, saya akan membantahnya

etika komunitas adalah kendaraan yang dapat mensintesis banyak pekerjaan saat ini

praktik kepemimpinan yang terkait dengan keadilan sosial dan tujuan moral lainnya

kepemimpinan pendidikan.

**Latar Belakang**

Argumen bahwa kepemimpinan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya moral

telah dikembangkan oleh banyak sarjana dalam beberapa tahun terakhir. Goldring dan Greenfield

(2002, hal. 2-3), misalnya, dalam karya terbaru mereka tentang "peran, harapan, dan

dilema "kepemimpinan, menyatakan bahwa" dimensi moral pendidikan

kepemimpinan dan administrasi ”merupakan salah satu syarat khusus itu

membuat administrasi sekolah "berbeda dari pekerjaan seperti itu dalam konteks lain".

Sergiovanni (1996, p. 57) juga berpendapat bahwa sekolah adalah “moral

komunitas ”yang membutuhkan pengembangan kepemimpinan berbeda yang berbasis di

"Otoritas moral". Menggunakan bahasa yang lebih menyenangkan, Hodgkinson (1995, p. 7) menyatakan

bahwa para pendidik adalah "pendeta sekuler yang bekerja di arena kegembiraan etis".

Sementara fokus pada moral dalam pendidikan bukanlah hal baru - Dewey (1922), untuk

misalnya, menulis tentang pendidikan sebagai praktik moral yang fundamental - apa adanya

baru adalah meningkatnya minat dan perluasan literatur ini dengan cepat belakangan ini

tahun. Mungkin ada banyak alasan untuk ini, termasuk kemunculan

perspektif humanis kritis pada 1980-an (mis. Foster, 1986), tantangan untuk

tradisi penelitian fungsionalis dominan di lapangan (Greenfield, 1979,

1999), serta "realitas baru" yang diakui secara luas dari konteks sosial

sekolah (Cunningham dan Mitchell, 1990).

Dalam pandangan saya, literatur ini muncul tentang moral dalam kepemimpinan pendidikan

jatuh ke dalam setidaknya tiga untai yang berbeda tetapi tumpang tindih - kepemimpinan moral

teori, tujuan moral kepemimpinan, dan praktik kepemimpinan etis. Pertama,

sarjana telah mengembangkan suatu badan kerja yang ditujukan untuk pengembangan eksplisit dari

teori kepemimpinan moral. Seperti yang Leithwood dan Duke (1998, hlm. 36) catat, moral

kepemimpinan "telah menjadi salah satu bidang studi kepemimpinan yang paling cepat berkembang".

Sarjana yang menulis di bidang ini berpendapat bahwa nilai adalah bagian sentral dari semua

praktik kepemimpinan dan bahwa fokus yang tepat dari studi kepemimpinan harus menjadi

nilai-nilai dan etika dipegang oleh para pemimpin sekolah itu sendiri. Sergiovanni's (1992, p. 16)

argumen untuk "jenis kepemimpinan baru" yang berbasis di "otoritas moral" adalah ilustrasi:

“Dengan memberi lebih banyak kepercayaan untuk merasakan pengalaman dan intuisi, dan dengan menerima otoritas suci

dan emosi sebagai cara yang sepenuhnya sah untuk mengetahui -, sistem nilai yang mendasari

teori manajemen dan praktik kepemimpinan akan tumbuh cukup besar untuk menjelaskan jenis baru

kepemimpinan - yang didasarkan pada otoritas moral. Kepemimpinan seperti ini dapat mengubah sekolah

ke dalam komunitas dan menginspirasi jenis komitmen, pengabdian, dan layanan yang akan dibuat

sekolah kami tiada bandingnya di antara lembaga masyarakat.”

Selain advokasi dan kerja teoretis, beberapa penelitian memiliki

mengeksplorasi kepemimpinan moral dalam tindakan dalam praktik administrator sekolah (mis.

Dillard, 1995; Enomoto, 1997; Greenfield, 1991; Kasten dan Ashbaugh, 1991;

Kelly dan Bredeson, 1991; Keyes et al., 1999; Marshall et al., 1996; Reitzug dan

Reeves, 1992). Di seluruh studi ini, temuan umum adalah administrator

sangat sadar akan aspek moral dari pekerjaan mereka dan apa yang mereka lakukan

mempraktikkan kepemimpinan moral dalam mengandalkan nilai-nilai inti dan komitmen mereka

untuk "ujung pandang" tertentu dalam pekerjaan mereka di sekolah.

Untai kedua dalam literatur adalah meningkatnya perhatian terhadap ini

“Tujuan akhir” atau tujuan moral dari kepemimpinan, yaitu, hasil yang dihargai

yang seharusnya menjadi tujuan dari upaya kepemimpinan di sekolah abad kedua puluh satu,

seperti keadilan sosial, keadilan rasial, dan pembelajaran untuk semua anak (Beck dan

Murphy, 1994; Furman, 2003; Hodgkinson, 1991). Dalam untaian ini, fokusnya bukan

begitu banyak pada nilai-nilai yang dipegang oleh para pemimpin itu sendiri, meskipun ini tentu saja

relevan, tetapi pada tujuan pekerjaan mereka, dengan kata lain, untuk apa kepemimpinan itu.

Dimana studi kepemimpinan tradisional cenderung mengambil relatif

pendekatan nilai-netral untuk mempelajari “apa itu kepemimpinan, bagaimana hal itu dilakukan, dan oleh

siapa ”(Furman, 2003), banyak beasiswa kontemporer berfokus pada alasannya

kepemimpinan - tujuan moralnya dan bagaimana mereka dapat dicapai di sekolah.

Murphy (1999) menguatkan pergeseran dalam literatur ini dengan mengidentifikasi tiga yang baru

"Paradigma" yang mungkin berfungsi sebagai "pusat" untuk studi kepemimpinan pendidikan

di abad ke dua puluh satu - peningkatan sekolah, komunitas demokratis, dan

keadilan sosial - dan mencatat bahwa masing-masing mewakili kemungkinan "nilai akhir"

untuk sekolah. Terkait, dalam menggambarkan karya sekolah Afrika-Amerika

pemimpin, Dantley (2003, hal. 196) menawarkan istilah "kepemimpinan bertujuan" untuk ditangkap

rasa komitmen para pemimpin ini terhadap tujuan moral pembangunan a

"Platform harapan" untuk siswa dan komunitas yang terpinggirkan.

Perkembangan ketiga dalam literatur terkait dengan sekolah sebagai moral

upaya adalah munculnya etika sebagai bidang studi yang berbeda selama 1980-an

dan 1990-an. Seperti yang dinyatakan oleh Beck dan Murphy (1997, hal. Viii), para sarjana pendidikan “adalah

menunjukkan jumlah bunga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertimbangan eksplisit

masalah etika ”, dan banyak yang berkontribusi pada pengembangan untaian ini

penelitian (mis. Beck, 1994; Beck dan Murphy, 1994; Begley, 1999; Furman dan

Gruenewald, dalam pers; Hodgkinson, 1991; Katz et al., 1999; Noddings, 1984;

Shapiro dan Stefkovich, 2001; Strike et al., 1998; Willower dan Licata, 1997). Oleh

pada pertengahan 1990-an, etika dibangun dengan kuat sebagai bagian dari "basis pengetahuan"

untuk para pemimpin pendidikan, dibuktikan dengan: “dimasukkan sebagai salah satu dari tujuh "domain" utama pengetahuan di Internet

proyek basis dokumen Dewan Universitas untuk Pendidikan

Administrasi (Hoy, 1994);

. proliferasi mata kuliah etika dalam program persiapan administrator

di universitas di seluruh negeri (Beck dan Murphy, 1997); dan

. dimasukkannya etika sebagai salah satu dari enam domain dalam banyak diadopsi

Standar "ISLLC" untuk persiapan administrator (Interstate School

Leaders Licensure Consortium, 1996)”

Mengingat pesatnya pertumbuhan etika sebagai bidang studi, penting untuk mengidentifikasi,

menganalisis, dan mengkritik konsep dan model dominan yang memengaruhi

lapangan. Monografi Beck dan Murphy (1994, 1997) telah menjadi penting

kontribusi dengan menganalisis cara - cara etika didekati baik dalam

literatur kepemimpinan pendidikan dan dalam program persiapan kepemimpinan. Di

ringkasan singkat, mereka menemukan dua cara utama untuk berpikir tentang etika dalam

bidang. Yang pertama adalah pendekatan etika sebagai prinsip yang dapat membimbing etika

penalaran dan pengambilan keputusan (mis. karya-karya Kidder, 1995; Strike et al.,

1998). Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa pendidik individu,

dalam praktik profesional sehari-hari mereka, dihadapkan dengan dilema etis

yang sulit diselesaikan; dengan menerapkan prinsip analisis etis, maka

individu dapat berpikir melalui dilema etis seperti itu dan membuat keputusan itu

secara etika sehat. Misalnya, dilema tertentu dapat dipahami sebagai a

konflik antara dua nilai yang saling bersaing, seperti keadilan versus belas kasihan; ketika

Dilema dipahami dengan cara ini, maka prinsip-prinsip untuk resolusi mungkin

terapan. Prinsip-prinsip ini untuk resolusi melibatkan membandingkan kemungkinan

hasil keputusan yang didasarkan pada berbagai pendekatan etika

penalaran, seperti berbasis tujuan (konsekuensialis), berbasis aturan

(non-konsekuensialis), atau pemikiran berbasis perawatan (Beck, 1994; Kidder, 1995).

Cara berpikir kedua tentang etika di bidang pendidikan

kepemimpinan, menurut Beck dan Murphy (1997, hal. 33), adalah untuk menyamakan etika

dengan "perspektif yang menginformasikan persepsi, karakter, dan kepercayaan". Di dalam

pandangan, "etika kurang tentang membuat keputusan menggunakan prinsip obyektif dan

lebih banyak tentang hidup secara moral dalam situasi tertentu ”(Beck and Murphy, 1997,

hal. 33). Dengan kata lain, etika didasarkan pada karakter individu -

internalisasi nilai-nilai moral dan kebajikan yang membimbing pribadi

dan praktik profesional, termasuk penyelesaian dilema moral

ditemui dalam latihan sehari-hari. Nodding's (1984) fokus pada kepedulian pada manusia

hubungan dan presentasi Starratt (1994, hlm. 29) tentang "dasar

kualitas orang yang etis ”adalah contoh dari pendekatan ini. walaupun

dua pendekatan etika yang diidentifikasi oleh Beck dan Murphy - prinsip untuk

pengambilan keputusan dan karakter individu - berbeda dalam penekanan mereka,

Perlu dicatat di sini bahwa keduanya berfokus pada individu sebagai etis

aktor; dengan kata lain, keduanya menyiratkan bahwa individu adalah "moral" utama

agen "yang berdampak pada sekolah, titik saya akan segera kembali.

Mungkin kerangka etika yang paling umum digunakan dalam pendidikan adalah

bingkai tri-partit yang dikembangkan oleh Starratt (1994, 2003). Starratt mengklaim itu

tiga "etika" yang mendasari praktik etika: etika keadilan, etika kritik,

dan etika perawatan. Etika ini saling melengkapi, dan masing-masing diperlukan

dalam proyek "membangun sekolah etis." Etika keadilan mensyaratkan itu

kita “memerintah diri kita sendiri dengan mematuhi keadilan. Artinya, kami saling memperlakukan

menurut beberapa standar keadilan yang diterapkan secara seragam untuk kita semua

hubungan ”(Starratt, 1994, hlm. 49). Dengan kata lain, keadilan atau perlakuan yang sama

adalah nilai inti yang mendasari etika keadilan: “Ide dasar [keadilan] adalah

bahwa masyarakat harus menetapkan aturan yang adil untuk semua dan kemudian hidup dengan itu

aturan ”(Mengangguk, 1999). Jika etika keadilan memandang keadilan, maka etika

kritik memandang hambatan terhadap keadilan. Asumsinya di sini adalah itu

tidak cukup untuk bekerja demi keadilan dalam sosial dan kelembagaan yang ada

pengaturan jika pengaturan itu sendiri tidak adil. Kita juga harus

kritik sistem sekarang, memeriksa cara kebijakan, praktik, dan

struktur mungkin tidak adil, bagaimana mereka mungkin menguntungkan satu kelompok

lain. Etika kritik diperlukan karena:

Tidak ada pengaturan sosial yang netral. Setiap pengaturan sosial, tidak peduli bagaimana itu muncul dengan sendirinya

sebagai sesuatu yang alami, perlu atau sekadar "apa adanya", adalah buatan. Biasanya disusun untuk

menguntungkan beberapa segmen masyarakat dengan mengorbankan yang lain. Tantangan etis adalah membuat

pengaturan sosial ini lebih responsif terhadap hak asasi manusia dan sosial semua warga negara

(Starratt, 1994, hlm. 47).

**Etika komunitas Seiring dengan etika,** komunitas telah semakin menjadi subjek analisis dan penelitian pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Pendukung pembangunan komunitas di sekolah-sekolah yang mengenakan seragam berdasarkan potensialnya, termasuk kewaspadaan yang rendah untuk siswa yang berprestasi, peningkatan prestasi siswa, peningkatan kollegialitas para pendidik, dan kemungkinan untuk praktik yang lebih demokratis (Furman, 2002; Louis dan Kruse, 1995; Sergiovanni, 1996); ; Bryk dan Driscoll, 1988; Shouse, 1996). Di bidang lain selain pendidikan, konsep komunitas juga mulai berkembang. Misalnya, pekerjaan Wenger (1998) dalam organisasi bisnis tampaknya menunjukkan bahwa "komunitas praktik" adalah unit sosial mendasar yang mempromosikan pembelajaran, kreativitas, dan tindakan konstruktif dalam organisasi. Sementara saya tidak bermaksud untuk melihat tinjauan masyarakat ini dalam setiap penelitian (dan pembaca akan mengetahui dengan asumsi dasar dan mengklaim dalam karya ini), apa yang diperlukan di sini adalah untuk menunjukkan hubungan antara karya ini pada komunitas dan proposal untuk etika komunitas

Sebagian besar studi tentang masyarakat di sekolah menekankan pentingnya hubungan, kolaborasi, dan komunikasi; namun demikian, dalam penggunaannya secara umum, kecenderungan "komunitas" yang lebih baik ini berhubungan, membentuk, menghasilkan, atau jenis kon ﬁ gurasi sosial. Dengan kata lain, ketika seseorang memahami istilah komunitas, ia membayangkan citra mental dari entitas yang berwujud. Jadi, ketika Sergiovanni (1994) menyerukan metafora baru untuk sekolah - menggantikan "komunitas" untuk "organisasi" - orang masih membayangkan sebuah organisasi yang mirip komunitas. Beck (2002) menguatkan kecenderungan ini untuk memandang komunitas sebagai sesuatu dalam ulasan analitiknya tentang literatur tentang komunitas. Dia menemukan bahwa gambar "ontologis" komunitas berlimpah: komunitas disamakan dengan "keluarga," "sirkus," "lingkungan", atau "grup jazz." Dengan kata lain, komunitas secara tipikal dipahami sebagai pelecehan, anentitytobe "menciptakan" sekolah, atau tipe spesifik “pengaturan sosial / organisasi” (Beck, 2002, hlm. 26). Sebaliknya, dalam analisis saya baru-baru ini tentang prospek untuk "menciptakan" komunitas di sekolah (Furman, 2002, hlm. 285, penekanan pada aslinya), saya menyimpulkan bahwa:

komunitas adalah prosesual. Rasa kebersamaan, hubungan dengan orang lain, didasarkan pada hubungan, yang pada gilirannya bergantung pada proses komunikasi, dialog, dan kolaborasi yang sedang berlangsung, dan bukan pada sekumpulan indikator bijaksana seperti "nilai-nilai bersama" dan "pengambilan keputusan bersama" . ”Dengan demikian, masyarakat bukanlah produk atau entitas yang dapat diukur, tetapi serangkaian proses yang berkelanjutan yang difasilitasi oleh pendidik yang memahami dan berkomitmen untuk proses ini.

Etika komunitas melengkapi dan memperluas bingkai yang dikembangkan oleh Starratt (1994) dan Shapiro dan Stefkovich (2001) dalam fokusnya pada komunal daripada individu. Ketika kerangka lainnya menyoroti nilai-nilai yang mungkin memandu praktik etis di sekolah - keadilan, kritik, dan kepedulian - etika masyarakat memusatkan praktik etis ini dalam proses komunal. Dengan demikian, etika masyarakat berguna dalam mengurangi salah satu masalah abadi penelitian "tradisional" dalam kepemimpinan pendidikan - asumsi yang tidak realistis bahwa pemimpin "heroik" dapat memberikan visi dan keahlian untuk mengatasi banyak tantangan yang dihadapi sekolah umum di usia dua puluh tahun. abad pertama dan memimpin sekolah dalam arah transformatif (Bogotch, 2002; Heifetz, 1994). Kerangka etika yang diperluas diilustrasikan dalam Gambar 1. Definisi dan argumen untuk etika komunitas ini menghasilkan dua pertanyaan segera [1]:

**Etika komunitas dan keadilan sosial** Untuk mengeksplorasi pentingnya etika komunitas di sekolah-sekolah saat ini, saya kembali ke poin yang dibuat sebelumnya dalam artikel ini, bahwa tujuan moral sekolah dan kepemimpinan sekolah menjadi fokus utama lapangan. Dengan kata lain, apa yang paling penting untuk dibahas dalam studi kepemimpinan pada abad kedua puluh satu adalah bagaimana kepemimpinan dapat membantu mencapai hasil yang bernilai seperti keadilan sosial, keadilan rasial, dan pembelajaran untuk semua anak di sekolah. Klaim di sini adalah bahwa praktik kepemimpinan harus didasarkan pada etika komunitas untuk mencapai tujuan moral ini. Dengan kata lain, etika masyarakat adalah wahana praktik kepemimpinan yang ditujukan untuk tujuan yang dihargai ini. Bagian ini melihat lebih dekat pada hubungan ini, menggunakan contoh keadilan sosial sebagai tujuan moral atau nilai akhir sekolah.

**Kesimpulan** Ketika saya berpikir tentang pentingnya etika masyarakat sebagai pedoman untuk praktik kepemimpinan, saya diingatkan tentang analisis yang sedang berlangsung sehubungan dengan masalah lain dalam pendidikan. Misalnya, ada dorongan besar untuk mengidentifikasi hubungan antara praktik kepemimpinan dan hasil belajar siswa; seperti halnya dengan pekerjaan pada keadilan sosial dan komunitas demokratis, usaha ini sering kali menderita dari asumsi bahwa pemimpin "heroik" individu dapat bertindak sebagai agen utama dalam meningkatkan pembelajaran siswa. [Dan, tentu saja, lingkungan kebijakan tingkat nasional dan negara bagian saat ini cenderung untuk menegaskan kembali gagasan ini dengan, misalnya, meminta pertanggungjawaban kepala sekolah atas peningkatan nilai ujian prestasi di sekolah mereka.] Namun, analisis baru mengakui kompleksitas dari kebijakan tersebut. hubungan antara kepemimpinan dan pembelajaran; mereka menciptakan perancah baru untuk memikirkan tentang hubungan yang berlapis-lapis, kompleks di antara berbagai dimensi sekolah yang berdampak pada pembelajaran. Misalnya, Spillane dan Louis (2002) "peta mundur" dari pembelajaran siswa melalui serangkaian tautan yang kompleks antara pengajaran di kelas, komunitas kelas, komunitas profesional di seluruh sekolah, pembelajaran organisasi, dan praktik kepemimpinan. Sementara analisis mereka menunjukkan semacam "variabel intervening" atau model rantai sebab akibat dalam kaitannya dengan hubungan antara kepemimpinan dan pembelajaran, pada saat yang sama itu jelas menyoroti pentingnya komunal dalam bekerja menuju peningkatan pembelajaran siswa. Mereka menyatakan, misalnya, bahwa tanpa pengembangan kepercayaan sosial, waktu untuk bertemu dan berbicara, suara guru yang kuat dalam keputusan, dan mengurangi ukuran dan kompleksitas sekolah, komunitas profesional - komponen penting untuk peningkatan pembelajaran siswa - tidak akan mungkin.

Saya melihat analisis ini sehubungan dengan etika komunitas dengan cara yang sama. Jika kita "mundur peta" dari tujuan moral menciptakan keadilan sosial di sekolah, seperti yang disajikan di sini, kita menemukan bahwa proses komunal demokratis adalah jantung dari bekerja menuju akhir yang berharga ini. Dan kita melihat bahwa praktik kepemimpinan berarti berpartisipasi dalam, mempromosikan, dan mendukung proses komunal ini. Etika komunitas menangkap sentralitas kebutuhan ini akan proses-proses komunal dengan cara yang tidak dimiliki etika keadilan, kritik, kepedulian (Starratt, 1994) dan profesi (Shapiro dan Stefkovich, 2001). Dengan demikian, etika masyarakat merupakan mata rantai yang hilang dalam berpikir tentang hubungan antara etika, praktik kepemimpinan, dan tujuan moral sekolah. Gambar 2 menggambarkan hubungan ini.